

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN PENDUDUK
DI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2010 - 2015

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Rizki Bayhaqi

Nomor Mahasiswa : 14313133

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2018



Rizki Bayhaqi

PENGESAHAN

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN PENDUDUK
DI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2010 - 2015**

Nama : Rizki Buyhaqi
Nomor Mahasiswa : 14313133
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Abdal Hakim .S.E., M.Ec., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL
**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN PENDUDUK DI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2010-2015**

Disusun Oleh : **RIZKI BAY HAQI**

Nomor Mahasiswa : **14313133**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 6 Agustus 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.



Penguji : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat dan hidayah serta kemudahan yang diberikan oleh Allah S.W.T sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk :

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang selama penulis menyelesaikan skripsi.
2. Kekasih Penulis Eli Dewi Saputri S.Tr.TW yang sangat penulis sayangi yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini selalu memberikan semangat dan doa.
3. Kepada dosen pembimbing tugas akhir saya Bapak Abdul Hakim ,S.E., M.Ec., Ph.D. Terima kasih banyak karena penulis sudah dibantu, dibimbing, diajari dan penulis tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran bapak.
4. Teman satu rumah, satu atap, satu kontrakan dengan penulis Keluarga Diwan, Sakti, Reza, Dana, Yose, Fitriyan Nugroho yang selalu mendukung dan membantu selama ini. Terima kasih banyak atas bantuannya.
5. Terimakasih banyak kepada Sahabat saya Amin Al Fikri, S.E dan kekasih saya yang telah membantu penulis dalam mencarikan sumber – sumber data penulis yang penulis teliti. Terima kasih banyak atas bantuannya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015”.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Abdul Hakim ,S.E., M.Ec., Ph.D. selaku dosen pembimbing dengan kesabarannya telah banyak mengarahkan dan memberikan masukan-masukan serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Jaka Sriyana, Dr., S.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Akhsyim Afandi Drs.,MA.Ec.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Sahabudin Sidiq ,S.E., M.A. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.
6. Semua teman – teman Ilmu Ekonomi 2014 yang mendukung baik di perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

Yogyakarta, 16 Juli 2018

(Penulis)

Rizki Bayhaqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN BERITA ACARA TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Kajian Pustaka.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Landasan Teori.....	22
B. Hubungan Variabel Independen Dan Dependen.....	27
C. Hipotesis.....	29
D. Sistematika Penulisan	30
BAB III METODELOGI PENELITIAN	32
A. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	32
B. Jenis Dan Cara Pengumpulan Data	34
C. Metode Analisis	35
D. Model Regresi Data Panel.....	35
E. Uji Statistik	38
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	41
A. Deskripsi Data Penelitian.....	41
B. Hasil Dan Analisis Data.....	41
C. Persamaan Estimasi Dengan Intersep Pembeda <i>Cross Effect</i>	47
D. Analisis Ekonomi.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	55
A. Kesimpulan	55
B. Implikasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gini ratio (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015	4
Tabel 1.2 IPM (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015	7
Tabel 1.3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rupiah) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015.....	10
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015	12
Tabel 1.5 DAU (Rupiah) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015.....	14
Tabel 2.1 Peringkat yang dibuat HDI.....	24
Tabel 3.1 Penjeasan setiap variabel.....	32
Tabel 4.1 Hasil Regresi Uji Chow Test.....	42
Tabel 4.2 Hasil Regresi Uji Hausman Test	43
Tabel 4.3 Hasil Regresi Fixed Effect Model	43
Tabel 4.4 Hasil Regresi Pengujian Hipotesis	46
Tabel 4.5 Nilai Crossid Provinsi	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Gini ratio (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015.....	62
Lampiran II Data IPM (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015	63
Lampiran III Data PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rupiah) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015.....	64
Lampiran IV Data Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015	65
Lampiran V Data DAU (Rupiah) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015.....	66
Lampiran VI Hasil Regresi Fixed Effect Model	67
Lampiran VII Hasil Regresi Uji Chow Test	68
Lampiran VIII Hasil Regresi Uji Hausman Test	68
Lampiran IX Penjelasan Setiap Variabel	69

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat, menganalisis dan mengetahui ketimpangan pendapatan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan variabel bebas IPM, PDRBADHK, Jumlah Penduduk dan DAU. Data yang digunakan adalah data cross section dan data time series yang biasanya disebut dengan data panel pada tahun 2010-2015 dengan metode Fixed Effects Model (FEM) pada program *evIEWS* 8.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Indeks Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat masih tergolong rendah walaupun mengalami kenaikan, variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini terjadi karena nilai IPMnya masih rendah karena tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah, sehingga perlu mendapat prioritas penanganan yang lebih banyak untuk dapat disejajarkan dengan kabupaten/kota lainnya, karena sebagaimana dimaklumi bahwa IPM mencakup unsur analisis yang meliputi variabel ekonomi dan non ekonomi. Variabel non ekonom diukur dari tingkat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat sedangkan variabel ekonomi dilihat dari pendapatan yang menunjukkan daya belimasyarakat. Variabel PDRBADHK dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan variabel DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: *Gini Ratio, IPM, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstant 2000, Dana Alokasi Umum*

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan, yang dimana terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Di setiap 5 pulau besar tersebut pasti membutuhkan sebuah pembangunan ekonomi. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam pembangunan Indonesia pasti memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan terjadi karena salah satu faktor seperti pemerintah lebih membangun daerah perkotaan dan di daerah hanya beberapa yang tersentuh oleh pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menghilangkan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena di wilayah Kalimantan Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah, baik dari karakteristik alam, sosial, ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Pembangunan ekonomi daerah di Kalimantan Barat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk yang semakin bertambah, oleh sebab itu dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa setiap tahunnya (Tambunan, 2001).

Pembangunan ekonomi masyarakat hakekatnya merupakan usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Menurut Meier (*Gemmell, 1994; 196*) pembangunan ekonomi adalah proses yang dapat menciptakan pendapatan *riil* perkapita sebuah Negara meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, sejumlah orang hidup dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Permasalahan ketimpangan yang ada saat ini tentunya akan dapat menggagalkan pembangunan ekonomi dari setiap daerah, dimana ketimpangan juga merupakan faktor terpenting yang di perhatikan dalam

pembangunan ekonomi. Adanya ketimpangan pendapatan seperti yang terjadi di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat tentunya dapat membedakan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat.

Dalam pembangunan pasti mempunyai pro dan kontra dari masyarakat. Ketidakpuasan dan kritik yang timbul dalam proses pembangunan pada dasarnya bukanlah semata-mata adanya pertumbuhan yang telah dicapai, akan tetapi karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, bahkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, dan lain-lain.

Tabel 1.1
Gini ratio (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2010-2015

Kabupaten/ Kota	Gini Ratio					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.31
Sambas	0.31	0.36	0.35	0.35	0.35	0.30
Bengkayang	0.30	0.33	0.34	0.31	0.32	0.27
Landak	0.20	0.26	0.34	0.31	0.30	0.31
Mempawah	0.40	0.31	0.33	0.32	0.31	0.29
Sanggau	0.34	0.34	0.39	0.32	0.31	0.29
Ketapang	0.41	0.31	0.30	0.32	0.31	0.33
Sintang	0.24	0.30	0.35	0.30	0.32	0.28
Kapuas Hulu	0.24	0.35	0.31	0.30	0.31	0.33
Sekadau	0.23	0.28	0.33	0.28	0.31	0.33
Melawi	0.28	0.27	0.33	0.31	0.28	0.28
Kayong Utara	0.28	0.34	0.38	0.38	0.29	0.35
Kubu Raya	0.29	0.34	0.35	0.38	0.42	0.32
Kota Pontianak	0.35	0.35	0.34	0.38	0.33	0.31
Kota Singkawang	0.32	0.31	0.36	0.37	0.38	0.33

Sumber: BPS Provinsi Kalbar

Jika dilihat dari sisi ketimpangan pendapatan yang ada pada tabel diukur menggunakan gini ratio, nilai gini ratio di Kalimantan Barat dari tahun 2010 ke 2011 angkanya mengalami penurunan sebesar 0.01 poin pada tahun 2010 sebesar 37% menjadi 36% dan pada tahun 2011 ke 2012 tidak terjadi perubahan tetap sebesar 36% tetapi pada tahun 2013 angkanya mengalami kenaikan 0.01 poin menjadi 0.37% dan di tahun 2014 angkanya tidak mengalami kenaikan tetap pada sebesar 37% dan pada tahun 2015 angkanya turun sebesar 0.06 poin menjadi 31%. Dilihat dari ketimpangan antar Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat dari data tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015 ketimpangan paling tinggi terdapat pada Kabupaten Kayong Utara sebesar 0.35%, sehingga besarnya mulai mengkhawatirkan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dianggap telah dapat mewakili tingkat kesejahteraan penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, karena sebagaimana dimaklumi bahwa IPM mencakup unsur analisis yang meliputi variabel ekonomi dan non ekonomi. Variabel non ekonomi diukur dari tingkat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat sedangkan variabel ekonomi dilihat dari pendapatan yang menunjukkan daya beli masyarakat, maka dengan asumsi ini kabupaten/kota

yang nilai IPMnya masih rendah dianggap tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah, sehingga perlu mendapat prioritas penanganan yang lebih banyak untuk dapat disejajarkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Peningkatan IPM di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat juga sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang telah menjadikan IPM sebagai salah satu alat analisis untuk menilai kemajuan maupun disparitas antar kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat.

Tabel 1.2
IPM (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2010-2015

Kab/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	61,97	62.35	63.41	64.3	64.89	65.59
Sambas	59,81	60.57	61.53	62.47	63.28	64.14
Bengkayang	62,50	62.94	63.42	63.99	64.4	64.65
Landak	60,36	61.67	62.38	62.72	63.59	64.12
Mempawah	59,48	59.95	60.75	62.09	62.78	63.37
Sanggau	60,57	60.96	61.39	61.72	62.06	63.05
Ketapang	60,63	61.47	62.04	62.85	63.27	64.03
Sintang	59,91	60.8	61.66	62.64	63.19	64.18
Kapuas Hulu	59,84	60.83	61.85	62.63	62.9	63.73
Sekadau	59,42	59.76	60.14	61.02	61.98	62.34
Melawai	60,91	61.18	61.58	62.27	62.89	63.78
Kayong Utara	55,83	56.58	57.53	57.92	58.52	60.09
Kubu Raya	61,87	62.56	63.42	63.94	64.52	65.02
Kota Pontianak	74,87	75.08	75.55	75.98	76.63	77.52
Kota Singkawang	67,27	67.5	68.54	69.13	69.84	70.03

Sumber: BPS Provinsi Kalbar

Perkembangan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian IPM. Pada Tahun 2010, IPM Kalimantan Barat mencapai 61.97% dan meningkat 0.38 point menjadi 62.45% dan pada tahun 2011 meningkat kembali sebesar 1.06 poin sehingga mencapai angka 63.41% dan pada tahun 2013 meningkat lagi sebesar 0.89 poin sehingga pencapaian IPM Kalimantan Barat mencapai angka 64.3% meningkat. Pada tahun 2014 sebesar 0.86 poin yaitu 64.89% dan pada tahun 2015 mencapai angka 65.59%. Dalam rentang tahun 2013–2015, IPM Kalimantan Barat meningkat sebesar 1.29% dari angka 64.3% pada tahun 2013 menjadi 65.59% pada tahun 2015.

Pada tahun 2013 hingga 2015 capaian IPM di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat termasuk ke dalam kategori terendah sampai tertinggi. Capaian IPM pada tahun 2013 hingga 2015 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. IPM dengan kategori terendah pada tahun 2013 yaitu di Kabupaten Kayong Utara sebesar 57.92%. IPM tertinggi di Kota Pontianak sebesar 77.52% pada tahun 2015.

Menurut Sukirno (2004), salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian pada suatu wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui PDRB dan PDRB per kapita.

Menurut BPS, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sementara itu, PDRB Perkapita Atas Dasar harga Konstan (ADHK tahun 2000) menunjukkan rata-rata pendapatan per kepala penduduk secara riil. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa PDRB perkapita adalah pendekatan ukuran rata-rata pendapatan perkapita di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh setiap Negara yang sedang berkembang dalam usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebar cukup merata dan diikuti dengan membaiknya taraf hidup dibawah garis kemiskinan. Sasaran yang dicapai pada umumnya dalam pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang dalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (*Robinson, 2004: 18*).

Tabel 1.3
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rupiah)
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2010-2015

Kab/Kota	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstant 2000					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	17,995,248.92	18,980,991.95	19,757,576.36	20,593,383.56	21,285,469.64	21,980,857.89
Sambas	2,934,326.19	1,799,5248.92	1,881,0634.23	1,972,0691.13	20,613,364.89	21,465,244.68
Bengkayang	1,166,187.32	17,382,516.23	18,058,265.50	18,792,801.30	19,204,696.40	19,484,689.34
Landak	1,601,720.55	14,011,595.71	14,528,598.65	15,037,272.66	15,537,069.88	16,115,828.54
Mempawah	1,220,564.81	14,304,240.22	14,656,781.76	15,213,412.11	15,893,564.03	16,634,061.61
Sanggau	2,665,715.34	22,021,662.24	22,958,874.08	23,930,255.03	24,270,802.70	24,719,703.61
Ketapang	2,792,790.78	25,947,019.32	26,638,394.80	27,375,426.66	2,761,6785.39	28,423,374.76
Sintang	2,086,332.30	16,975,393.20	17,631,170.04	18,472,483.74	19,159,012.17	19,767,304.34
Kapuas Hulu	1,182,011.43	19,409,416.68	19,959,325.70	20,629,396.90	21,068,859.37	21,550,904.85
Sekadau	66,8124.84	14,648,249.90	15,336,308.33	16,100,388.78	16,925,260.46	17,750,568.10
Melawi	53,3763.17	12,590,328.26	13,144,148.09	13,550,704.29	13,952,260.46	14,320,309.55
Kayong Utara	43,5429.70	17,055,323.76	17,707,434.04	18,301,456.31	19,006,972.79	19,547,319.58
Kubu Raya	4,936,652.99	22,071,815.93	23,132,334.12	24,224,554.05	25,313,118.27	26,561,208.13
Kota Pontianak	6,621,193.74	28,406,790.06	30,065,256.54	31,890,035.24	33,166,588.93	34,226,641.64
Kota Singkawang	1,230,090.19	22,914,286.83	23,978,543.22	25,068,491.68	26,268,219.16	27,164,851.78

Sumber: BPS Provinsi Kalbar

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010–2015 dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki kontribusi tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di

Provinsi Kalimantan Barat disusul Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang.

PDRB penduduk per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang mana melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungan. Jumlah penduduk yang tinggi disuatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Lincoln (2010:338-340) mengatakan bahwa jumlah pertumbuhan penduduk memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Lincoln juga menambahkan bahwa masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, ataupun antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2010-2015

Kab/Kota	Jumlah Penduduk					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	4,395,983	4,47,7348	4,550,297	4,641,393	4,716,093	4,789,574
Sambas	4,961.20	5,011.49	5,054.44	5,155.71	5,198.87	5,231.15
Bengkayang	2,152.77	2,200.67	2,244.07	2,287.71	2,328.73	2,386.10
Landak	3,296.49	3,354.52	3,406.35	3,475.04	3,528.97	3,576.08
Mempawah	2,340.21	2,377.22	2,410.03	2,459.24	2,495.21	2,517.75
Sanggau	4,084.86	4,159.55	4,226.58	4,311.75	4,389.94	4,445.96
Ketapang	4,274.60	4,376.13	4,468.49	4,557.51	4,642.27	4,759.85
Sintang	3,647.59	3,713.22	3,771.90	3,846.92	3,907.96	3,963.92
Kapuas Hulu	2,221.60	2,270.67	2,315.12	2,361.36	2,404.10	2,459.98
Sekadau	1,816.34	1,841.03	1,862.66	1,900.48	1,917.97	1,933.91
Melawi	1,786.45	1,822.25	1,854.49	1,890.61	1,923.01	1,959.99
Kayong Utara	95,594	97,643	99,495	1,015.29	1,032.82	1,054.77
Kubu Raya	5,009.70	5,103.73	5,188.03	5,293.20	5,388.15	5,454.09
Kota Pontianak	5,547.64	5,658.56	5,758.43	5,871.69	5,980.97	6,076.18
Kota Singkawang	1,864.62	1,908.01	1,947.43	1,987.42	2,021.96	2,076.01

Sumber: BPS Provinsi Kalbar

Dilihat dari data di tabel 1.4 Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan Kota Pontianak menjadi daerah yang menyumbang poin tertinggi puncaknya di tahun 2015 sebesar 607618 jiwa untuk jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2010-2015. Diharapkan juga jika tingkat produksi bisa meningkat agar pendapatan perkapita di Provinsi Kalimantan Barat bisa menuju angka yang positif dan penduduk bisa sejahtera.

Dalam masalah ketimpangan pendapatan kita juga harus melirik DAU (Dana Alokasi Umum) Provinsi tersebut karena menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DAU adalah salah satu dana perimbangan yang termasuk bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan agar terjadi keseimbangan keuangan antar daerah untuk pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi

hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tabel 1.5
DAU (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2010-2015

Kabupaten/ Kota	Dana Alokasi Umum					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	755.123.093.000	845.483.888.000	1.023.229.807.000	1.144.712.840.000	1.290.222.856.000	1.405.594.169
Sambas	463.406.160.000	520.019.698.000	622.612.006.000	702.231.663.000	763.059.843.000	793.128.760
Bengkayang	295.931.543.000	340.823.512.000	399.692.985.000	457.245.355.000	494.245.071.000	529.863.441
Landak	358.090.492.000	403.595.524.000	477.731.189.000	534.166.873.000	589.729.984.000	619.248.444
Mempawah	313.155.439.000	350.258.317.000	410.336.243.000	463.983.726.000	503.427.631.000	527.927.949
Sanggau	444.197.737.000	502.566.510.000	598.206.205.000	674.049.502.000	740.610.477.000	760.206.338
Ketapang	608.067.401.000	671.248.725.000	776.577.558.000	898.337.135.000	1.020.384.603.000	1.070.459.827
Sintang	490.697.841.000	553.592.817.000	646.998.388.000	738.622.011.000	820.084.062.000	868.071.560
Kapuas Hulu	537.348.225.000	602.042.118.000	686.858.835.000	782.050.975.000	873.552.160.000	913.007.845
Sekadau	253.937.101.000	288.662.775.000	339.546.757.000	386.021.907.000	424.128.392.000	442.188.681
Melawi	288.933.942.000	332.100.019.000	387.406.601.000	468.104.101.000	557.198.047.000	584.820.744
Kayong Utara	218.278.970.000	254.802.207.000	303.211.589.000	343.376.301.000	380.125.181.000	415.875.881
Kubu Raya	414.760.167.000	460.860.606.000	535.464.386.000	627.894.391.000	699.700.430.000	732.770.242

Kabupaten/ Kota	Dana Alokasi Umum					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Pontianak	408.180.404.000	454.002.216.000	549.629.456.000	626.879.054.000	670.090.725.000	686.035.831
Kota Singkawang	269.526.606.000	309.388.293.000	373.908.313.000	431.527.888.000	467.557.081.000	478.943.765

Sumber: BPS Provinsi Kalbar

Jika dilihat dari data di tabel 1.5 Dana Alokasi Umum di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai 2015. dilihat dari tahun 2010 sebesar Rp. 755.123.093.000 dan meningkat lagi pada tahun 2011 sebesar Rp. 845.483.888.000 pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.023.229.807.000 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.1.405.594.169. Diharapkan juga jika dana tersebut bisa tersalurkan tepat sasaran agar pembangunan sarana infrastrukturnya di Provinsi Kalimantan Barat bisa lebih baik dan masyarakat juga bisa terkena dampak yang positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di buat, maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian yakni:

1. Bagaimana pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan terhadap disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat?
4. Apakah DAU (Dana Alokasi Umum) berpengaruh terhadap disparitas Pendapatan antara Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat?

C. Tujuan dan manfaat

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk terhadap ketimpangan disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

D. Kajian Pustaka

Dengan melihat dan mengkaji pada penelitian sebelumnya baik yang sama pokok bahasannya maupun yang beda, maka kajian pustaka yang akan dijadikan pertimbangan atau konsep konsep dalam penelitian diantara lain sebagai berikut:

Agnes Ratih (2010) melakukan penelitian yang berjudul "*Disparitas Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 1996-1999 dan tahun 2004-2007*". Penelitian ini bertujuan melihat tingkat disparitas pendapatan antar wilayah pada 10 kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah pada dua kurun waktu, yaitu tahun 1996-1999 dan tahun 2004-2007.

Kajian ini berlandaskan pada hipotesis Simon Kuznets (1955) yang menyebutkan bahwa ketimpangan (disparitas) pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan dan cenderung menurun pada tahap-tahap berikutnya mengikuti kurva U-terbalik. Dengan menggunakan Indeks Williamson diperoleh hasil bahwa semakin tinggi pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau semakin besar pendapatan per kapita, semakin besar pula disparitas pendapatan yang

terjadi. Disparitas berfluktuasi dan cenderung meningkat pada tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Astuti (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di DIY (2005 – 2013)*". Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya alam daerah yang ditunjukkan dengan variabel SDA tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini dikarenakan DIY mengalami pergeseran basis ekonomi menuju sektor niaga dan jasa.

Kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini dikarenakan usia harapan hidup yang tinggi menyebabkan banyaknya usia non-produktif yang tinggal di DIY, sehingga memicu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Akai dan Sakata (2005: 14) dengan judul "*Desentralisasi Fisikal, Komitmen, dan Ketimpangan Regional*" menunjukkan bahwa PDRB perkapita dan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut Wie (dalam Litantia, 2010:8) mengatakan bahwa pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang pesat dapat terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratasi.

Muhaimin (2014) menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2011, dengan alat analisis ketimpangan distribusi pendapatan, Hipotesis Kuznets, serta Regresi data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif, sedangkan variabel inflasi, ump dan kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa.

Ni Luh Putu dan I Ketut Sudibia melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali (2007-2013)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari tahun 2007-2013.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan

distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Sari Rusmita melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Lokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat". Hasil penelitian menjelaskan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintahan Kabupaten/Kota masih tergantung oleh DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Karena DAU yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat justru digunakan untuk membiayai belanja pegawai pemerintah daerah.

DAU merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar. Pelimpahan kewenangan pada pemerintah daerah juga diikuti dengan pelimpahan dalam bidang keuangan. Pelimpahan dalam bidang keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur keuangan, diantaranya:

1. Penerimaan Daerah dari Dana Bagi Hasil, SDA dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan fiskal bagi daerah yang memiliki SDA seperti minyak, gas alam, hasil pertambangan, kehutanan, perkebunan, serta perikanan
2. Penerimaan Daerah dari Bagi Hasil Pajak
3. Skema bantuan pemerintah dalam bentuk transfer yakni DAU.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hukum Gini Ratio

Gini atau lebih lengkapnya Corrado Gini adalah seorang ahli statistika Italia yang menganalisis pembagian pendapatan personal dengan peralatan matematis yang rumusnya sering disebut **Hukum Gini** yang dipublikasikan pada tahun 1908. Gini tidak menentukan tingkat pendapatan tertentu, tetapi menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima di atas tingkat tertentu. Untuk itu Hukum Gini erat hubungannya dengan Hukum Pareto. Gini dalam Bowman (1974) menentukan jumlah pendapatan yang diterima oleh sejumlah orang.

Perkembangan selanjutnya Hukum Gini sering dihubungkan dengan kurva Lorenz. Koefisien Gini atau bilangan Gini sering dipakai untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan. Angka Gini dapat diturunkan dari berbagai formula. Dari formula Pareto dapat diperoleh angka Gini. Demikian pula angka Gini dapat diperoleh fungsi kepadatan pendapatan (*density function*). Kakwani (1973) mencoba menafsirkan beberapa modifikasi tentang kurva Lorenz dan kemudian dapat pula diturunkan berbagai macam angka Gini.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Upaya terkini untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi secara komprehensif dalam negara berkembang maupun negara maju telah dilakukan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* (HDR). Laporan ini adalah pembentukan dan penajaman ulang Indeks Pembangunan Manusia (HDI atau *Human Development Indeks*). HDI mencoba untuk memeringkat semua Negara dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir. Produk akhir 35 pembangunan tersebut yaitu pertama, masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan usia harapan hidup, kedua pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah (sepertiga). Ketiga adalah standar kehidupan (*standart of living*) yang diukur dengan pendapatan riil per kapita disesuaikan dengan paritas daya beli. Dengan menggunakan ketiga ukuran pembangunan tersebut, HDI memeringkat semua negara menjadi tiga kelompok yang terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.1
Peringkat yang dibuat HDI

Peringkat	Skala
Rendah	0.0 sampai 0.499
Menengah	0.50 sampai 0.799
Tinggi	62.09

Sumber: Todaro, 2003

Salah satu keuntungan terbesar dari HDI adalah indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia. HDI mengingatkan bahwa pembangunan yang dimaksud adalah pembangaunan dalam arti yang luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Indeks yang disusun UNDP memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai komponen-komponen penyusun pembangunan, berbagai negara yang berhasil dalam pembangunan (dicerminkan oleh peningkatan HDI 36 sepanjang waktu) dan perbandingan kelompok dan kawasan di dalam suatu negara. Dengan mengkombinasikan data sosial dan ekonomi, HDI membuat banyak negara menerapkan ukuran yang lebih luas dalam kinerja pembangunannya, dan untuk memfokuskan kebijakan ekonomi dan sosialnya secara lebih langsung ke dalam berbagai bidang yang membutuhkan perbaikan (Todaro, 2003:73).

Nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut: $IPM_j = 1/3 \sum \text{Indeks } X_j$ (i,j) dimana: Indeks $X(i,j)$ $i = 1, 2, 3 =$ Indeks Komponen IPM ke-i untuk wilayah ke-j $j = 1, 2, \dots, k$ wilayah terlihat bahwa untuk menghitung IPM, terlebih dahulu dihitung Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan. Penghitungan masing-masing indeks dilakukan mengikuti rumus sebagai berikut: Indeks $X(i,j) = (X(i,j) - X(i-\text{min})) / (X(i-\text{maks}) - X(i-\text{min}))$ Dimana: $X(i,j)$ $X =$ Indeks komponen ke-i dari daerah j $(i-\text{min}) =$ Nilai minimum dari X_i $X(i-\text{maks}) =$ Nilai Maksimum dari X

2.5.1 Rasio Angka Harapan Hidup i Rasio Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Rasio Angka Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua 37 data yang digunakan dalam penghitungan Rasio Angka Harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP.

3. Produk Domestik Regional Bruto perkapita Atas Dasar Harga Konstan

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. PDRB yang dimaksud adalah PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam juta rupiah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan rupiah).

4. Jumlah Penduduk

Menurut Maltus (dikutip dalam Lincolin Arsyad 1997) kecenderungan umum penduduk suatu Negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret ukur. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten.

5. Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2009) Ketimpangan suatu Provinsi dengan Provinsi lainnya tidak bisa dihindari karena adanya desentralisasi fiskal, yang disebabkan oleh rendahnya pajak dan Sumber Daya Alam dimana Pemerintah Daerah kurang mengeksploitasinya. Pemerintah Pusat akan memberi subsidi berupa DAU (Dana Alokasi Umum) Kepada daerah untuk mengatasi Ketimpangan itu. Bagi daerah tingkat kemiskinannya tinggi, akan memperoleh DAU yang lebih besar dibanding daerah yang sudah sejahtera. Untuk mengurangi ketimpangan pembiayaan dan pajak antar pusat dan daerah akan dikelola dengan baik dengan cara dibuatnya kebijakan bagi hasil dan DAU minimal 26% dari Penerimaan dalam Negeri.

B. Hubungan Variabel Independen dengan Dependen

1. Hubungan IPM dengan Ketimpangan Pendapatan

Beberapa penyebab dari adanya ketimpangan suatu daerah adalah ketidakmerataan IPM, biaya infrastruktur dan investasi serta dapat juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. IPM dan investasi tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

yang mempengaruhi IPM dan biaya infrastruktur secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Hubungan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, sehingga persentase pertambahan output tersebut harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Dalam upaya meningkatkan pendapatan perkapita daerah (PDRB per kapita) juga harus dilibatkan berbagai faktor produksi (sumber-sumber ekonomi) dalam setiap kegiatan produksi. Pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi faktor produksi tenaga kerja, kapital, sumberdaya alam, teknologi dan faktor sosial (seperti adat istiadat, keagamaan, sistem pemerintahan).

3. Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Ketimpangan Pendapatan

Adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak meratanya jumlah tenaga kerja dan investasi pada suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

4. Hubungan DAU dengan Ketimpangan Pendapatan

Dengan adanya pengalokasian dana yang baik maka akan tercipta keseimbangan atau keselarasan bagi pertumbuhan di daerah tersebut yang mana diikuti dengan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut dan pendapatan perkapita di daerah tersebut bisa meningkat dengan adanya pertumbuhan pembangunan yang baik. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

C. Hipotesis

Hipotesis Penelitian ini adalah :

1. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di daerah Kalimantan Barat.
2. Diduga PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di daerah Kalimantan Barat.
3. Diduga populasi pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di daerah Kalimantan Barat.

4. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di daerah Kalimantan Barat.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latarbelakang masalah, rumusan masalah, kegunaan dan tujuan serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan Tinjauan Teori yang merupakan dasar Teoritis penelitian, kerangka pemikiran yang digambarkan dalam sebuah bagan dan uraian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang variable penelitian dan Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta uraian tentang metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, Analisis data yang menitik beratkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan, dalam bab ini juga akan diuraikan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk mempermudah analisis dan memperjelas variabel – variabel yang ada dalam penelitian ini maka dilakukan variabel operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penjelasan Setiap Variabel

Variabel	Satuan	Sumber
Gini Ratio (Y)	% (Persen)	BPS Provinsi Kalbar
IPM (X1)	% (Persen)	BPS Provinsi Kalbar
PDRB perkapita ADHK (X2)	Rp (Rupiah)	BPS Provinsi Kalbar
Jumlah Penduduk (X3)	Jiwa	BPS Provinsi Kalbar
Dana Alokasi Umum (X4)	Rp (Juta Rupiah)	BPS Provinsi Kalbar

1. Gini Ratio (Y) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan pendapatan penduduk disuatu wilayah tersebut. Data yang digunakan adalah pendapatan penduduk 14 Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2010 – 2015, diperoleh dari halaman resmi Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

2. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia (X1) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara seluruh dunia. Data yang digunakan mulai dari tahun 2010-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Kalimantan Barat.
3. PDRB perkapita atas dasar harga Konstant (X2) menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Data yang digunakan mulai dari tahun 2010-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Jumlah Penduduk (X3) adalah kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonomi seperti

produsen dengan konsumen. Data yang digunakan mulai dari tahun 2010-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Kalimantan Barat.

5. Dana Alokasi Umum atau DAU (X4) adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Data yang digunakan mulai dari tahun 2010-2015 yang diperoleh dari Peraturan Republik Indonesia Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari Tahun 2010-2015.

B. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel 14 Kabupaten atau Kota Yang ada di Provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu dari tahun 2010-2015. Data kuantitatif adalah data dalam kumpulan angka-angka. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang sudah diolah. Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang (*cross section*) yang diambil dari keseluruhan Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan untuk data antar waktunya (*time series*) diambil mulai tahun 2010-2015. Data yang merupakan

gabungan dari data *cross section* dan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini disebut juga dengan data panel.

Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga data panel memberikan informasi observasi tiap individu dalam sampel. Keuntungan menggunakan panel data yaitu dapat meningkatkan jumlah sampel populasi dan mempebesar *degree of freedom*, serta penggabungan informasi yang berkaitan dengan variabel *cross section* dan *time series*.

C. Metode Analisis

Dalam Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan data menggunakan program Eviews 8.

D. Model Regresi Data Panel

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + U_{it}$$

Keterangan:

Y = Gini Ratio

β_0 = Koefisien intersep

β_1 = Koefisien pengaruh IPM (X1)

β_2 = Koefisien pengaruh PDRB perkapita ADHK(X2)

β_3 = Koefisien pengaruh Jumlah Penduduk (X3)

β_4 = Koefisien pengaruh DAU (X4)

i = Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

t = Waktu (tahun 2010-2015)

Ut = Variabel pengganggu

Adapun tiga model pendekatan atau langkah – langkah dalam melakukan regresi data panel adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect Models (CEM)*

Merupakan pendekatan yang paling sederhana yang disebut CEM atau *pooled least square*, dimana pada model ini maka diasumsikan intersep masing – masing koefisien adalah sama, begitu pula slope koefisien pada data *cross section* dan *time series*nya. Berdasarkan asumsi tersebut maka persamaan model CEM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + u_{it}$$

2. *Fixxed Effect Models (FEM)*

Merupakan pendekatan dimana merupakan salah satu cara untuk memperhatikan unit cross section pada model regresi data panel adalah dengan memperoleh nilai intersep yang berbeda – beda pada setiap unit cross section tetapi masih mengasumsikan slope koefisien yang tetap. Maka persamaan model FEM adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + u_{it}$$

3. *Random Effect Models (REM)*

Pada model REM, diasumsikan α_i merupakan variabel random dengan mean α_0 , sehingga intersep dapat diasumsikan sebagai $\alpha_1 = \alpha_i + e_i$, dimana e_i merupakan error random yang mempunyai mean 0 dan varians e_i tidak secara langsung diobservasi atau disebut juga variabel laten. Persamaan model REM adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta X_{it} + u_{it}$$

Dalam menentukan estimasi model regresi data panel dilakukan beberapa uji untuk memilih metode pendekatan estimasi yang sesuai dan menghasilkan regresi yang baik. Langkah – langkah yang dilakukan untuk memperoleh model yang tepat pertama adalah melakukan regresi dengan menggunakan regresi model CEM kemudian FEM dan yang terakhir model REM. Setelah mendapat hasil dari estimasi ketiga model tersebut kemudian melakukan test dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman dan uji LM untuk dapat menentukan hasil regresi mana yang baik dari ketiga model tersebut.

- a. Uji Chow dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model *common effect* dengan model *fixed effect* dengan uji hipotesis sebagai berikut:

Untuk melakukan uji pemilihan estimasi *Common Effect* atau estimasi *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan melihat p-value apabila signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*.

Sedangkan apabila p-value tidak signifikan ($\geq 5\%$) maka model yang digunakan adalah model *Common Effect*.

- b. *Uji Hausman* digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model estimasi *fixed effect* dan *random effect*. Untuk melakukan *uji Hausman* maka dapat melihat dari nilai *P-value*. Apabila *p-value* signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*. Sebaliknya bila *p-value* tidak signifikan ($\geq 5\%$), maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effect*.

E. Uji Statistik

1. Uji Determinasi (R²)

Dalam hal ini mengukur seberapa besar proporsi variasi variable dependen dijelaskan oleh semua variable independen, atau mengukur sejauh mana persentase model regresi mampu menerangkan variasi variable dependennya.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono, 2013: 65). Hipotesis yang digunakan:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_a : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Dengan membandingkan nilai prob f-stat dengan α (0.05=5%), jika prob f-stat $< \alpha$ maka menolak H_0 maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila prob f-stat $> \alpha$ maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t statistik)

Untuk menguji pengaruh variable independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

a. Untuk variabel IPM (X_1)

H_0 : $\beta_1 \geq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel X_1 terhadap variabel Y

H_a : $\beta_1 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel X_1 terhadap variabel Y

b. Untuk variabel PDRB ADHK (X_2)

H_0 : $\beta_2 \geq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel X_2 terhadap variabel Y

H_a : $\beta_2 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel X_2 terhadap variabel Y

c. Untuk variabel Jumlah Penduduk (X_3)

H_0 : $\beta_3 \geq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel X_3 terhadap variabel Y

Ha : $\beta_3 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel X3 terhadap variabel Y

d. Untuk variabel DAU (X4)

H0 : $\beta_4 \geq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel X4 terhadap variabel Y

Ha : $\beta_4 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel X4 terhadap variabel Y

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai prob t-stat dengan α (0.05=5%), jika prob t-stat $< \alpha$ maka menolak H0 dan gagal menolak Ha maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila prob t-stat $> \alpha$ maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. (Widarjono, 2013).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data Penelitian

Skripsi ini meneliti mengenai analisis ketimpangan pendapatan penduduk di daerah Kalimantan Barat dengan menggunakan model data panel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data *cross section* serta data *time series* setiap Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat periode 2010–2015. Data yang dipakai meliputi data Pendapatan Penduduk yang diukur dengan Gini Ratio, IPM, PDRB perkapita ADHK, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Umum.

B. Hasil dan Analisis Data

1. Uji Chow Test

Pengujian yang dilakukan menggunakan uji chow bertujuan untuk memilih model yang terbaik antara *common effect model* dengan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut:

Ho: memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*.

Ha: memilih menggunakan model estimasi *Fixed effect*.

Untuk melakukan pemilihan antara *common effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* signifikan (kurang dari $\alpha = 5\%$) maka model yang digunakan adalah estimasi *fixed effect*, begitu juga sebaliknya jika *p-value*

tidak signifikan (lebih besar dari $\alpha = 5\%$) maka model yang digunakan adalah estimasi *common effect*.

Tabel 4.1
Hasil Regresi Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: LOG_FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.678484	(13,66)	0.0866
Cross-section Chi-square	23.993581	13	0.0312

Pada tabel diatas hasil regresi dengan menggunakan *evIEWS 8* maka didapatkan nilai hasil probabilitas Chi-square = 0.0312, yang berarti probabilitas = $0.0312 < \alpha = 5\%$, sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

2. Uji Hausman Test

Uji yang digunakan untuk memilih model yang terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut:

Ho: memilih menggunakan model estimasi *Random effect*.

Ha: memilih menggunakan model estimasi *Fixed effect*.

Untuk melakukan pemilihan antara model *random effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* signifikan (kurang dari $\alpha = 5\%$) maka model yang digunakan adalah estimasi *fixed effect*, begitu juga sebaliknya jika *p-value* tidak

signifikan (lebih besar dari $\alpha = 5\%$) maka model yang digunakan adalah estimasi *random effect*.

Tabel 4.2
Hasil Regresi Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: LOG_RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.958570	4	0.0115

Pada tabel diatas hasil regresi dengan menggunakan *eviews 8* maka didapatkan nilai hasil probabilitas Chi-square = 0.0115, yang berarti probabilitas = $0.0115 < \alpha = 5\%$, sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Tabel 4.3
Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/25/18 Time: 14:38
Sample: 2010 2015
Included observations: 6
Cross-sections included: 14
Total pool (balanced) observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.60884	9.741987	1.499575	0.1385

LOG(X1?)	4.425114	1.968539	2.247917	0.0279
LOG(X2?)	0.046173	0.016996	2.716595	0.0084
LOG(X3?)	-2.754418	1.245968	-2.210664	0.0305
LOG(X4?)	0.009749	0.006106	1.596681	0.1151
Fixed Effects (Cross)				
_SAMBAS--C	-1.010012			
_BENGKAYANG--C	-0.044365			
_LANDAK--C	-1.005424			
_MEMPAWAH--C	0.762276			
_SANGGAU--C	0.887578			
_KETAPANG--C	0.351847			
_SINTANG--C	-1.051210			
_KAPUAS_HULU--C	-1.619660			
_SEKADAU--C	-1.568377			
_MELAWI--C	-3.372484			
_KAYONG_UTARA--C	1.630169			
_KUBU_RAYA--C	1.496219			
_KOTA_PONTIANAK--C	-2.303650			
_KOTA_SINGKAWANG--C	6.847092			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.461742	Mean dependent var		-1.145279
Adjusted R-squared	0.323100	S.D. dependent var		0.126521
S.E. of regression	0.104094	Akaike info criterion		-1.499644
Sum squared resid	0.715141	Schwarz criterion		-0.978755
Log likelihood	80.98507	Hannan-Quinn criter.		-1.290251
F-statistic	3.330459	Durbin-Watson stat		1.799279
Prob(F-statistic)	0.000228			

$$Y = 14.60884 + 4.425114\text{Log}X1 + 0.046173\text{Log}X2 - 2.754418\text{Log}X3 + 0.009749\text{Log}X4 + e$$

Keterangan:

Y = Gini Ratio

β_0 = Koefisien intersep

β_1 = Koefisien pengaruh IPM (X1)

β_2 = Koefisien pengaruh PDRB perkapita ADHK(X2)

β_3 = Koefisien pengaruh Jumlah Penduduk (X3)

β_4 = Koefisien pengaruh DAU (X4)

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat. Dari hasil regresi pengaruh IPM, PDRB(ADHK), Jumlah Penduduk, DAU terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015 dengan estimasi *fixed effect*, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.461742 atau sebesar 46%. Hal ini membuktikan bahwa variasi variabel IPM, PDRB (ADHK), Jumlah Penduduk, DAU dapat dijelaskan oleh variabel tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 34% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak berpengaruh. Dari hasil regresi didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.000228 < \alpha = 5\%$, artinya signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

6. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Tabel 4.4

Hasil Regresi Pengujian Hipotesis

Variabel	t -Statistik	Prob.	Keterangan
X1	2.247917	0.0279	Signifikan
X2	2.716595	0.0084	Signifikan
X3	-2.210664	0.0305	Signifikan
X4	1.596681	0.1151	Tidak Signifikan

Sumber: *eviews 8*

Berdasarkan uji *Fixed effect* yang telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa:

a. X1 (IPM)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0279 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015. Artinya ketika jumlah IPM bertambah 1% maka akan meningkatkan Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4.425114 %.

b. X2 (PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0084 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015. Artinya ketika jumlah PDRB (ADHK) bertambah satu juta rupiah maka akan meningkatkan Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0.046173%.

c. X3 (Jumlah Penduduk)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0305 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2015. Artinya ketika jumlah penduduk bertambah satu jiwa maka akan menambah Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat sebesar - 2.754418 jiwa.

d. X4 (DAU)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.1151 > \alpha = 5\%$ berarti tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015.

C. Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda *Cross Effect*

Persamaan estimasi dengan mempertimbangkan *cross effect* dapat dilakukan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi koefisien *cross effect*. *Cross effect* diperoleh berdasarkan estimasi yang mengikuti jumlah individu dalam penelitian, maka sesungguhnya koefisien tersebut akan dimiliki oleh masing – masing unit atau individu. (Sriyana, 2014)

Tabel 4.5
Nilai Crossid Provinsi

Crossid	Effect
Sambas	-1.010012
Bengkayang	-0.044365
Landak	-1.005424
Mempawah	0.762276
Sanggau	0.887578
Ketapang	0.351847
Sintang	-1.051210
Kapuas Hulu	-1.619660
Sekadau	-1.568377
Melawi	-3.372484
Kayong Utara	1.630169
Kubu Raya	1.496219
Kota Pontianak	-2.303650
Kota Singkawang	6.847092

Sumber: *views 8*

Tabel 4.5 Menunjukkan nilai crossid dari masing – masing provinsi di Indonesia.

Persamaan regresi:

Sambas

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.010012 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 13.598828$$

Bengkayang

$$Y_{it} = 14.60884 - 0.044365 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 14.564475$$

Landak

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.005424 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 13.603416$$

Mempawah

$$Y_{it} = 14.60884 + 0.762276 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 15.371116$$

Sanggau

$$Y_{it} = 14.60884 + 0.887578 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 15.496418$$

Ketapang

$$Y_{it} = 14.60884 + 0.351847 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 14.960687$$

Sintang

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.051210 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 13.55763$$

Kapuas Hulu

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.619660 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 12.98918$$

Sekadau

$$Y_{it} = 14.60884 - 1.568377 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 14.564475$$

Melawi

$$Y_{it} = 14.60884 - 3.372484 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 11.236356$$

Kayong Utara

$$Y_{it} = 14.60884 + 1.630169 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 16.239009$$

Kubu Raya

$$Y_{it} = 14.60884 + 1.496219 + 4.425114 \log X_{1it} + 0.046173 \log X_{2it} - 2.754418 \log X_{3it} + 0.009749 \log X_{5it} + e_{it} = 16.105059$$

Kota Pontianak

$$Y_{it} = 14.60884 - 2.303650 + 4.425114 \log X1_{it} + 0.046173 \log X2_{it} - 2.754418 \log X3_{it} + 0.009749 \log X5_{it} + e_{it} = 12.30519$$

Kota Singkawang

$$Y_{it} = 14.60884 + 6.847092 + 4.425114 \log X1_{it} + 0.046173 \log X2_{it} - 2.754418 \log X3_{it} + 0.009749 \log X5_{it} + e_{it} = 21.455932$$

Dari hasil tersebut dapat terlihat besarnya pengaruh IPM, PDRB (ADHK), Jumlah Penduduk, dan DAU terhadap Ketimpangan Pendapatan yang ada di setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Kabupaten Sambas tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 13.598828, Kabupaten Bengkayang tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 14.564475, Kabupaten Landak tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 13.603416, Kabupaten Mempawah tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 15.371116, Kabupaten Sanggau tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 15.496418, Kabupaten Ketapang tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 14.960687, Kabupaten Sintang tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 13.55763, Kabupaten Kapuas Hulu tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 12.98918, Kabupaten Sekadau tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 14.564475, Kabupaten Melawi tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 11.236356, Kabupaten Melawi tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 11.236356, Kabupaten Kayong Utara tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 16.239009, Kabupaten Kubu Raya tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 16.105059, Kota Pontianak tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 12.30519, dan yang terakhir Kota Singkawang tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 21.455932.

Dari hasil tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan paling rendah yaitu di Kabupaten Melawi dengan nilai 11.236356, sedangkan untuk tingkat ketimpangan pendapatan paling tinggi yaitu di Kota Singkawang sebesar 21.455932.

D. Analisis Ekonomi

1. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat. Pengaruh yang signifikan antara IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat mengindikasikan bahwasannya naik turunnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh nilai IPM. Dengan demikian IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. IPM yang tidak merata antar berbagai kabupaten atau kota akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Hal ini akan mendorong tidak seimbang pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan maka ketimpangan pendapatan yang terjadi antar daerah akan semakin melebar.

2. Analisis Pengaruh PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Terhadap Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat

Dari hasil regresi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita ADHK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Artinya apabila nilai angka dari PDRB Perkapita ADHK naik maka akan diikuti oleh kenaikan dari angka ketimpangan pendapatan. Ini berarti angka variabel PDRB Perkapita ADHK di Provinsi Kalimantan Barat yang tinggi, tidak bisa menjamin bahwa dapat menurunkan angka ketimpangan pendapatan. Selama ini ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh indeks gini merupakan salah satu indikator dari adanya pembangunan ekonomi. PDRB Perkapita ADHK di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang dari tahun – ke tahunnya menunjukkan peningkatan mengindikasikan adanya pula peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB Perkapita ADHK tidak serta merta menurunkan nilai ketimpangan, namun berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut tentunya sejalan ketika peningkatan PDRB perkapita naik maka berpengaruh terhadap kenaikan ketimpangan pendapatan.

Hal ini didukung dengan teori Kuznets menekankan adanya perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi, dimana dalam prosesnya sektor

industri dan jasa cenderung berkembang dan terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Selama masa transisi tersebut, produktivitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi dari pada sektor tradisional, sehingga pendapatan perkapita yang diterima juga lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut meningkat. Pada awal pembangunan ekonomi, pendapatan perkapita masih rendah dan kesenjangan pendapatan yang juga rendah, kesenjangan pendapatan semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita.

3. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat

Pada hasil regresi didapatkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk dengan ketimpangan pendapatan yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Adanya peningkatan populasi yang diimbangi dengan peningkatan aktivitas ekonomi akan menyebabkan perekonomian meningkat. Beban ekonomi tiap keluarga menjadi relatif rendah atau ringan. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran lapangan pekerjaan yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan yang tadinya orang itu menganggur menjadi bekerja sehingga meningkatkan standar hidupnya karena telah mempunyai pendapatan.

4. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel DAU tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah kurang tepat sasaran pemerintah melakukan lebih banyak pengeluaran pemerintah untuk belanja [pemerintah atau gaji pegawai sedangkan pengeluaran untuk pembangunan sarana dan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat belum merata sehingga masyarakat kurang bisa memaksimalkan hasil produksinya sehingga pendapatan mereka belum maksimal yang mengakibatkan masih tingginya ketimpangan pendapatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh IPM, PDRB(ADHK), Jumlah Penduduk dan DAU terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015 dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kurangnya kualitas pendidikan yang berperan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga dengan adanya IPM yang baik dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.
2. Variabel PDRB perkapita ADHK didapatkan hasil bahwa PDRB perkapita ADHK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dikarenakan selama ini PDRB perkapita ADHK merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang dalam peningkatannya berdampak pada kenaikan ketimpangan pendapatan.
3. Pada variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal tersebut disebabkan dengan adanya peningkatan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat adanya peningkatan populasi yang diimbangi dengan

4. Peningkatan aktivitas ekonomi akan menyebabkan perekonomian meningkat. Beban ekonomi tiap keluarga menjadi relatif rendah atau ringan.
5. Variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya peningkatan pengeluaran daerah yang berperan dalam peningkatan pembangunan ekonomi dengan membangun sarana dan infrastruktur, sehingga dengan adanya peningkatan tersebut dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.
6. Berdasarkan Kurva U-terbalik atau Kuznet Provinsi Kalimantan Barat berada pada tahap masa transisi yaitu dari sektor tradisional ke sektor modern, selama masa transisi tersebut, produktivitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi daripada sektor tradisional, sehingga pendapatan perkapita yang diterima juga lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut meningkat. Pada awal pembangunan ekonomi, pendapatan perkapita masih rendah dan kesenjangan pendapatan yang juga rendah, kesenjangan pendapatan semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh IPM, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan, Jumlah Penduduk dan DAU terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2015 terdapat beberapa Implikasi yaitu :

1. IPM berpengaruh positif atau signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga diharapkan disamping pemerintah terus berusaha meningkatkan IPM yang kurang baik, pemerintah pun harus memberikan perhatian khusus bagi penduduk terutama dalam hal pendidikan, karena pendidikan berperan dalam peningkatan kualitas produktivitas.
2. Variabel PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan yang berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan tentunya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi setiap daerah yang ada karena seiring dengan peningkatan PDRB akan diikuti dengan kenaikan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat kesenjangan pendapatan merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi oleh setiap daerah. Pembangunan yang ada bukan hanya pembangunan daerah yang bersifat terpusat namun juga yang dapat menjangkau daerah – daerah terpencil yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sehingga roda perekonomian dapat bergerak seimbang di setiap Kabupaten/Kotanya.
3. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dimana adanya peningkatan jumlah penduduk yang diimbangi dengan aktivitas ekonomi. Pemerintah harus mempunyai regulasi yang mengatur jumlah penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat meningkatkan kualitas penduduk. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang ada seiring untuk menciptakan penduduk yang

berkualitas terutama lapangan pekerjaan padat karya. Dimana hal tersebut dapat melatih kemampuan dan keahlian bagi penduduk non-produktif. Sehingga para penduduk non-produktif dapat memiliki pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasakan kesejahteraan.

4. Variabel DAU tidak berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat. Harusnya pemerintah memberikan regulasi yang kuat untuk DAU agar tidak terjadi penyelewengan DAU karena dana tersebut sangat rawan. Selain itu pemerintah juga harus mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan, dan juga penghematan terhadap kegiatan yang kurang produktif seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, serta penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam pengalokasian anggaran yang bertujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan rakyat serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Ratih (2010). “*Disparitas Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 1996-1999 dan tahun 2004-2007*”. Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. I, No. 2, Desember 2010, 123 – 134
- Astuti, Riska. (2015), “*Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2005-2013)*”. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bowman, Mary Jean. 1974. “A Graphical of Personal Income Distribution The United States. American Economic Review”
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.Yogyakarta.
- BPS.Kalimantan Barat. 2010 - 2015.
- Hadi Sasana, 2006, Analisis Dampak Transfer Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal di Kab/Kota di Provinsai Jateng Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2, Hal. 223-242.
- Kakwani and N. Podder. “On The Estimation of Lorenz Curves From Grouped Observations”. International Economic Review.14 hal.278-291.
- Lincoln Arsyad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta.

- Muhaimin, Ilham Farih, (2014). “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa”. *Skripsi* (tidak dipublikasikan), Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Natalia, N. 2015. *Pengaruh Jumlah Dan Jenis Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Barat*. Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tanjungpura.
- Ni Luh Putu dan I ketut Sudibia. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali (2007-2013)”. *Piramida*, Vol X1, No.1, : 20 – 28.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sari Rusmita, 2016, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Universitas Tanjungpura.
- Sriyana, Jaka (2014), *Metode Regresi Data Panel*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Susanto, A. B., & Rachmawati, L. (2013). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan*. *Jurnal Mahasiswa*.
- Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M. dan Smith, S., (2006), “Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan”, Terjemahan, Penerbit Erlangga, Ciracas Jakarta.

LAMPIRAN

Data Gini ratio (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015

Kabupaten/ Kota	Gini Ratio					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.31
Sambas	0.31	0.36	0.35	0.35	0.35	0.30
Bengkayang	0.30	0.33	0.34	0.31	0.32	0.27
Landak	0.20	0.26	0.34	0.31	0.30	0.31
Mempawah	0.40	0.31	0.33	0.32	0.31	0.29
Sanggau	0.34	0.34	0.39	0.32	0.31	0.29
Ketapang	0.41	0.31	0.30	0.32	0.31	0.33
Sintang	0.24	0.30	0.35	0.30	0.32	0.28
Kapuas Hulu	0.24	0.35	0.31	0.30	0.31	0.33
Sekadau	0.23	0.28	0.33	0.28	0.31	0.33
Melawi	0.28	0.27	0.33	0.31	0.28	0.28
Kayong Utara	0.28	0.34	0.38	0.38	0.29	0.35
Kubu Raya	0.29	0.34	0.35	0.38	0.42	0.32
Kota Pontianak	0.35	0.35	0.34	0.38	0.33	0.31
Kota Singkawang	0.32	0.31	0.36	0.37	0.38	0.33

Data IPM (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015

Kab/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	61,97	62.35	63.41	64.3	64.89	65.59
Sambas	59,81	60.57	61.53	62.47	63.28	64.14
Bengkayang	62,50	62.94	63.42	63.99	64.4	64.65
Landak	60,36	61.67	62.38	62.72	63.59	64.12
Mempawah	59,48	59.95	60.75	62.09	62.78	63.37
Sanggau	60,57	60.96	61.39	61.72	62.06	63.05
Ketapang	60,63	61.47	62.04	62.85	63.27	64.03
Sintang	59,91	60.8	61.66	62.64	63.19	64.18
Kapuas Hulu	59,84	60.83	61.85	62.63	62.9	63.73
Sekadau	59,42	59.76	60.14	61.02	61.98	62.34
Melawai	60,91	61.18	61.58	62.27	62.89	63.78
Kayong Utara	55,83	56.58	57.53	57.92	58.52	60.09
Kubu Raya	61,87	62.56	63.42	63.94	64.52	65.02
Kota Pontianak	74,87	75.08	75.55	75.98	76.63	77.52
Kota Singkawang	67,27	67.5	68.54	69.13	69.84	70.03

Data PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rupiah)
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015

Kab/Kota	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstant 2000					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	17,995,248.92	18,980,991.95	19,757,576.36	20,593,383.56	21,285,469.64	21,980,857.89
Sambas	2,934,326.19	1,799,5248.92	1,881,0634.23	1,972,0691.13	20,613,364.89	21,465,244.68
Bengkayang	1,166,187.32	17,382,516.23	18,058,265.50	18,792,801.30	19,204,696.40	19,484,689.34
Landak	1,601,720.55	14,011,595.71	14,528,598.65	15,037,272.66	15,537,069.88	16,115,828.54
Mempawah	1,220,564.81	14,304,240.22	14,656,781.76	15,213,412.11	15,893,564.03	16,634,061.61
Sanggau	2,665,715.34	22,021,662.24	22,958,874.08	23,930,255.03	24,270,802.70	24,719,703.61
Ketapang	2,792,790.78	25,947,019.32	26,638,394.80	27,375,426.66	2,761,6785.39	28,423,374.76
Sintang	2,086,332.30	16,975,393.20	17,631,170.04	18,472,483.74	19,159,012.17	19,767,304.34
Kapuas Hulu	1,182,011.43	19,409,416.68	19,959,325.70	20,629,396.90	21,068,859.37	21,550,904.85
Sekadau	66,8124.84	14,648,249.90	15,336,308.33	16,100,388.78	16,925,260.46	17,750,568.10
Melawi	53,3763.17	12,590,328.26	13,144,148.09	13,550,704.29	13,952,260.46	14,320,309.55
Kayong Utara	43,5429.70	17,055,323.76	17,707,434.04	18,301,456.31	19,006,972.79	19,547,319.58
Kubu Raya	4,936,652.99	22,071,815.93	23,132,334.12	24,224,554.05	25,313,118.27	26,561,208.13
Kota Pontianak	6,621,193.74	28,406,790.06	30,065,256.54	31,890,035.24	33,166,588.93	34,226,641.64
Kota Singkawang	1,230,090.19	22,914,286.83	23,978,543.22	25,068,491.68	26,268,219.16	27,164,851.78

Data Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2010-2015

Kab/Kota	Jumlah Penduduk					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	4,395,983	4,47,7348	4,550,297	4,641,393	4,716,093	4,789,574
Sambas	4,961.20	5,011.49	5,054.44	5,155.71	5,198.87	5,231.15
Bengkayang	2,152.77	2,200.67	2,244.07	2,287.71	2,328.73	2,386.10
Landak	3,296.49	3,354.52	3,406.35	3,475.04	3,528.97	3,576.08
Mempawah	2,340.21	2,377.22	2,410.03	2,459.24	2,495.21	2,517.75
Sanggau	4,084.86	4,159.55	4,226.58	4,311.75	4,389.94	4,445.96
Ketapang	4,274.60	4,376.13	4,468.49	4,557.51	4,642.27	4,759.85
Sintang	3,647.59	3,713.22	3,771.90	3,846.92	3,907.96	3,963.92
Kapuas Hulu	2,221.60	2,270.67	2,315.12	2,361.36	2,404.10	2,459.98
Sekadau	1,816.34	1,841.03	1,862.66	1,900.48	1,917.97	1,933.91
Melawi	1,786.45	1,822.25	1,854.49	1,890.61	1,923.01	1,959.99
Kayong Utara	95,594	97,643	99,495	1,015.29	1,032.82	1,054.77
Kubu Raya	5,009.70	5,103.73	5,188.03	5,293.20	5,388.15	5,454.09
Kota Pontianak	5,547.64	5,658.56	5,758.43	5,871.69	5,980.97	6,076.18
Kota Singkawang	1,864.62	1,908.01	1,947.43	1,987.42	2,021.96	2,076.01

Data DAU (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015

Kabupaten/ Kota	Dana Alokasi Umum					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	755.123.093.000	845.483.888.000	1.023.229.807.000	1.144.712.840.000	1.290.222.856.000	1.405.594.169
Sambas	463.406.160.000	520.019.698.000	622.612.006.000	702.231.663.000	763.059.843.000	793.128.760
Bengkayang	295.931.543.000	340.823.512.000	399.692.985.000	457.245.355.000	494.245.071.000	529.863.441
Landak	358.090.492.000	403.595.524.000	477.731.189.000	534.166.873.000	589.729.984.000	619.248.444
Mempawah	313.155.439.000	350.258.317.000	410.336.243.000	463.983.726.000	503.427.631.000	527.927.949
Sanggau	444.197.737.000	502.566.510.000	598.206.205.000	674.049.502.000	740.610.477.000	760.206.338
Ketapang	608.067.401.000	671.248.725.000	776.577.558.000	898.337.135.000	1.020.384.603.000	1.070.459.827
Sintang	490.697.841.000	553.592.817.000	646.998.388.000	738.622.011.000	820.084.062.000	868.071.560
Kapuas Hulu	537.348.225.000	602.042.118.000	686.858.835.000	782.050.975.000	873.552.160.000	913.007.845
Sekadau	253.937.101.000	288.662.775.000	339.546.757.000	386.021.907.000	424.128.392.000	442.188.681
Melawi	288.933.942.000	332.100.019.000	387.406.601.000	468.104.101.000	557.198.047.000	584.820.744
Kayong Utara	218.278.970.000	254.802.207.000	303.211.589.000	343.376.301.000	380.125.181.000	415.875.881
Kubu Raya	414.760.167.000	460.860.606.000	535.464.386.000	627.894.391.000	699.700.430.000	732.770.242
Kota Pontianak	408.180.404.000	454.002.216.000	549.629.456.000	626.879.054.000	670.090.725.000	686.035.831
Kota Singkawang	269.526.606.000	309.388.293.000	373.908.313.000	431.527.888.000	467.557.081.000	478.943.765

Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/25/18 Time: 14:38
 Sample: 2010 2015
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 14
 Total pool (balanced) observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.60884	9.741987	1.499575	0.1385
LOG(X1?)	4.425114	1.968539	2.247917	0.0279
LOG(X2?)	0.046173	0.016996	2.716595	0.0084
LOG(X3?)	-2.754418	1.245968	-2.210664	0.0305
LOG(X4?)	0.009749	0.006106	1.596681	0.1151
Fixed Effects (Cross)				
_SAMBAS--C	-1.010012			
_BENGKAYANG--C	-0.044365			
_LANDAK--C	-1.005424			
_MEMPAWAH--C	0.762276			
_SANGGAU--C	0.887578			
_KETAPANG--C	0.351847			
_SINTANG--C	-1.051210			
_KAPUAS_HULU--C	-1.619660			
_SEKADAU--C	-1.568377			
_MELAWI--C	-3.372484			
_KAYONG_UTARA--C	1.630169			
_KUBU_RAYA--C	1.496219			
_KOTA_PONTIANAK--C	-2.303650			
_KOTA_SINGKAWANG--C	6.847092			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.461742	Mean dependent var		-1.145279
Adjusted R-squared	0.323100	S.D. dependent var		0.126521
S.E. of regression	0.104094	Akaike info criterion		-1.499644
Sum squared resid	0.715141	Schwarz criterion		-0.978755
Log likelihood	80.98507	Hannan-Quinn criter.		-1.290251
F-statistic	3.330459	Durbin-Watson stat		1.799279
Prob(F-statistic)	0.000228			

Hasil Regresi Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: LOG_FIXED
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.678484	(13,66)	0.0866
Cross-section Chi-square	23.993581	13	0.0312

Hasil Regresi Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: LOG_RANDOM
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.958570	4	0.0115

Penjelasan Setiap Variabel

Variabel	Satuan	Sumber
Gini Ratio (Y)	% (Persen)	BPS Provinsi Kalbar
IPM (X1)	% (Persen)	BPS Provinsi Kalbar
PDRB perkapita ADHK (X2)	Rp (Rupiah)	BPS Provinsi Kalbar
Jumlah Penduduk (X3)	Jiwa	BPS Provinsi Kalbar
Dana Alokasi Umum (X4)	Rp (Juta Rupiah)	BPS Provinsi Kalbar